



HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SENIN, 29 APRIL 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

'KEJAR TAYANG' SIDANG SENGKETA PILEG Ada 297 Permohonan, Digelar 3 Panel



JADWAL LENGKAP AGENDA SIDANG PHPU PILEG 2024

- **Pemeriksaan Pendahuluan (29 April 2024-3 Mei 2024)**
(Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon)
- **Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan (3-13 Mei 2024)**
(Paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan)
- **Pemeriksaan Persidangan (6-15 Mei 2024)**
(Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan)
- **Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH (15-20 Mei 2024)**
(RPH pembahasan dan pengambilan putusan)
- **Pengucapan Putusan/Ketetapan (21-22 Mei 2024)**
- **Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (27-31 Mei 2024)**
(Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan)
- **Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH (3-6 Juni 2024)**
(RPH pembahasan perkara dan pengambilan putusan)
- **Pengucapan Putusan/Ketetapan (7-10 Juni 2024)**
(Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara)
- **Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (7-10 Juni 2024)**



DETIL PERKARA YANG SUDAH DITERIMA MK

- Total ada sebanyak 297 perkara yang dimohonkan. Terdiri dari:
 - 285 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD,
 - 12 permohonan PHPU anggota DPD.
- **Dilihat dari asal Parpol**
 - PPP 24 gugatan
 - Partai Nasdem 20 gugatan
 - Partai Amanat Nasional (PAN) 19 gugatan
 - Partai Gerindra 17 gugatan
 - Demokrat 17 gugatan
 - Partai Golkar 14 gugatan
 - PDI-P 13 gugatan
 - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12 gugatan
 - Partai Bulan Bintang (PBB) 8 gugatan.
 - Perindo 6 gugatan
 - Hanura 4 gugatan,
 - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 gugatan
 - Gelora 4 gugatan
 - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2 gugatan.
 - Garuda 2 gugatan.
- **PARPOL LOKAL**
 - Partai Aceh 1 gugatan
 - Partai Adil Sejahtera Aceh 1 gugatan
 - Partai Nanggroe Aceh 1 gugatan

**Government (Hal.2)
Jumlah Bandara
Internasional
Dipangkas,
Kini Tersisa 17**

Sidang perdana gugatan Pileg 2024 akan digelar Senin (29/4/2024) hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Total ada sebanyak 297 perkara yang dimohonkan. Terdiri dari 285 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, serta 12 permohonan PHPU anggota DPD. Angka ini diketahui lebih banyak dibandingkan Pileg 2019 dengan 262 perkara. Bak 'kejar tayang' sidang bisa berjalan dari pukul 08.00 pagi hingga dini hari keesokan harinya. Istirahat yang diberikan hanya untuk beribadah dan makan. Pada hari pertama hakim akan menyidangkan 79 perkara yang terbagi dalam tiga panel persidangan. Panel pertama untuk 25 perkara, panel dua untuk 28 perkara, dan panel tiga untuk 26 perkara. Ditargetkan seluruh perkara sengketa PHPU Pileg rampung pada 10 Juni 2024.

Baca di hal 11....

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, Kini Tersisa 17

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas sejumlah bandara berstatus internasional. Saat ini tersisa 17 dari sebelumnya sebanyak 34 bandara internasional. Ada apa?

"KM 31/2024 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub atau pengumpan internasional di negara sendiri," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Minggu (28/4/2024).

Keputusan itu keluar setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 atau KM 31/2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional tertanggal 2 April 2024. Keputusan ini sudah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Adapun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, dari 34 bandara internasional yang resmi dibuka sejak 2015 hingga 2021 ini, hanya beberapa bandara saja yang melayani penerbangan niaga ke luar negeri. Di antaranya seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Kualanamu.

Sementara bandara internasional lainnya, ujar Adita, hanya melayani penerbangan jarak dekat dari/atau ke satu atau dua negara saja. "Bandara internasional lainnya hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional," ucapnya.

Adita menilai bandara berstatus internasional yang hanya melakukan beberapa penerbangan luar negeri atau bahkan tidak sama sekali, menyebabkan operasional menjadi tidak efektif serta efisien dalam pemanfaatannya. Karena itu, Kemenhub memangkas sejumlah bandara internasional yang dinilai belum memanfaatkan perjalanan internasional.

"Selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu dan bukan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain," katanya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam praktiknya, sejumlah negara juga telah melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Ia menyebut India, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,42 miliar hanya memiliki 18 bandara internasional. Begitu pula dengan Amerika Serikat, yang mengelola 18 bandara internasional.



Bandar Udara Supadio Pontianak termasuk bandara yang dikembalikan statusnya menjadi domestik, bukan lagi bandara internasional. (Foto.dok)

Diharap Tingkatkan Turis-Bisnis

Pengamat penerbangan Alvin Lie berharap keputusan tersebut memotivasi setiap daerah mengembangkan potensi daerahnya untuk menarik warga negara lain datang ke Indonesia, baik untuk berwisata maupun kepentingan bisnis.

"Harapan saya adalah dengan pemerintah sekarang menetapkan 17 bandara International ini, menjadi motivasi bagi yang 17 ini maupun daerah-daerah lain yang belum berstatus International untuk mengembangkan potensi daerahnya baik itu perdagangan, perindustrian, wisata atau apa pun agar menarik bagi pelaku bisnis, wisata dari negara lain untuk mengunjungi," kata Alvin.

Alvin menuturkan keputusan menteri (KM) yang diterbitkan ini nantinya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, menurutnya, bandara yang berstatus internasional nantinya juga bisa bertambah menyesuaikan kebutuhan.

"Saya melihat bahwa keputusan ini bentuknya KM, KM itu bisa dengan sangat cepat diubah tidak dengan UU. Kalau memang KM saat ini hanya membatasi 17 daerah atau 17 bandara International, itu dapat sewaktu-waktu diubah kalau memang ada potensinya yaitu memang dibutuhkan adanya penerbangan dari negara-negara lain ke daerah di Indonesia," ujarnya.

"Kemudian KM ini sifatnya adalah mengatur untuk penerbangan reguler tapi tidak menutup kemungkinan bandara-bandara yang statusnya domestik ini tetap bisa melayani penerbangan rute International dengan catatan yaitu jenis-jenisnya adalah penerbangan International yang sifatnya insidental atau ad hoc," lanjutnya.

Alvin mendorong daerah yang menjadi bagian dari 17 bandara internasional itu untuk mengembangkan daya tarik daerahnya di kancan internasional.

Dia berharap status bandara internasional yang ditetapkan itu tidak hanya dijadikan sebagai status semata.

"Harapan saya bagi daerah-daerah yang menginginkan ada bandarannya melayani rute internasional secara reguler ya silakan mempromosikan daerahnya di luar negeri membangun daya tarik perdagangan perindustrian atau pertanian sehingga menarik pelaku perjalanan dari negara lain. Jangan hanya menyandang status internasional hanya karena gengsi atau prestasi politik saja. Ada kata internasionalnya," ucapnya.

"Jadi KM 31 ini bukan vonis mati, ini adalah proses penyederhanaan agar rute-rute penerbangan internasional itu dapat dikonsentrasikan dan bandara-bandara kita ini tidak hanya menjadi feeder bagi Singapura maupun Malaysia. Dengan harapan juga efektifitas perjalanan udara ini juga dapat mendukung maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia," sambungnya.

Sementara, Alvin menyampaikan untuk bandara lain yang tidak ditetapkan sebagai bandara internasional untuk tidak berkecil hati. Dia mengatakan secara kualitas bandara internasional dan non internasional sama, hanya saja bandara internasional memiliki fasilitas tambahan seperti Imigrasi dan Bea-Cukai.

"Saya juga perlu tegaskan bandara-bandara di Indonesia, baik yang berstatus domestik maupun internasional itu semua kualitasnya sama, standar kualitasnya sama, dalam arti standar keselamatan, fasilitas navigasi, fasilitas penerbangan sama, yang membedakan bandara yang melayani rute internasional ada fasilitas Imigrasi costume atau Bea-Cukai dan karantina serta bandara yang melayani rute internasional tentunya menyediakan gedung khusus atau bagian dari terminal itu khusus melayani

BANDARA DI INDONESIA YANG DICABUT STATUS INTERNASIONALNYA

1. Bandara Maimun Saleh, Sabang.
2. Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Silangit.
3. Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang.
4. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.
5. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan.
6. Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
7. Bandara Adisutjipto, Yogyakarta.
8. Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
9. Bandara Adi Soemarmo, Solo.
10. Bandara Banyuwangi, Banyuwangi.
11. Bandara Supadio, Pontianak.
12. Bandara Juwata, Tarakan.
13. Bandara El Tari, Kupang.
14. Bandara Pattimura, Ambon.
15. Bandara Frans Kaisiepo, Biak.
16. Bandara Mopah, Merauke.
17. Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin

penerbangan dari internasional karena harus melewati proses imigrasi pabean dan karantina. lain-lain sama, jadi tidak perlu berkecil hati kalau tidak berstatus internasional tidak baik, itu tidak benar," ucapnya. (wid,rls,ist/dya)

Gaduh Larangan Warung Madura Buka 24 Jam DPR Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah untuk UKM

JAKARTA-Larangan Warung Madura buka 24 jam menjadi buah bibir. Para wakil rakyat ikut buka suara dan ramai-ramai mengecam kebijakan yang dikabarkan berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tersebut.

"Keberadaan warung Madura telah memberi kontribusi positif di banyak hal, seperti membantu kebutuhan masyarakat sepanjang hari, menjaga keamanan lingkungan, menyerap tenaga kerja, menggerakkan perekonomian rakyat kecil dan melahirkan para pengusaha baru," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Menurut dia, jika warung kelontong kecil seperti warung Madura dipersempit ruang geraknya, banyak pelaku usaha yang akan gulung tikar dan akhirnya berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran.

Dia menegaskan pemerintah seharusnya bisa lebih mengedepankan aspek hati nurani dan pikiran yang jernih, serta menyediakan iklim usaha yang bersahabat bagi para pelaku usaha kecil. Hal tersebut dilakukan agar pelaku UKM bisa berkembang.

"Harus dengan pikiran yang normal, waras dan berperikemanusiaan. Harus didukung agar lebih berkembang, bukan malah dilarang (pembatasan jam operasional)," harapnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Jam operasional nonstop 24 jam Warung Madura, mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja kapan saja.

Amin juga berujar, konsep bisnis yang dikembangkan warung Madura merupakan bentuk perlawanan pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dominasi bisnis konglomerasi yang semakin menggurita hingga ke pelosok desa. Warung Madura ini merupakan kemandirian usaha rakyat (UMKM) untuk bisa bertahan dari gempuran pemodal besar.

"Operasional 24 jam itu merupakan bentuk inovasi dan strategi mereka untuk mendapatkan ceruk pasar tertentu. Justru aneh jika kemudian dilarang," ujar Amin, Minggu (28/4/2024).

Komedian Taretan Muslim dan pendakwah Habib Husein bin Ja'far Al Hadar atau Habib Ja'far juga ikut buka suara.

Dalam Instagram resminya, Taretan Muslim menyampaikan, masyarakat Pulau Garam membuka Warung Madura 24 jam karena memiliki etos kerja yang tinggi.

"Orang Madura kalau soal kerja keras dan kegigihan memang nomer 1,



(Ilustrasi)Kemenkop UKM tepis kabar soal larangan buka Warung kelontong kecil seperti warung Madura. (Foto: dok)

sampok ada yang resah mungkin kalah saing akhirnya minta bantu pemerintah," sentil @tretanmuslim, dikutip Minggu (28/4/2024).

Habib Ja'far pun tak ketinggalan berkomentar prihal Warung Madura 24 jam tersebut. Menurutnya, pemerintahan harusnya berpihak pada UMKM seperti Warung Madura. Menurutnya, negara wajib adil bagi semua penyelenggara ekonomi dalam aturannya.

"Harusnya sih berpihak pada UMKM kayak Warung Madura sih. Cuma tak apa kalau mau diatur, tapi sebenar-benarnya diatur dalam seluruh aspek yang memberikan rasa adil bagi Warung Madura. Jangan aspek yang menguntungkan Warung Madura diatur, eh giliran aspek yang menguntungkan minimarket dan merugikan Warung Madura dibiarkan," tulis Instagram @husein_hadar

Klarifikasi Kemenkop UKM

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung Madura untuk operasi 24 jam. Hal ini sebagai respons hebohnya pemberitaan mengenai jam operasional warung Madura di Klungkung, Bali.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenkopUKM) Arif Rahman Hakim, bahkan mengatakan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

"Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu," ujar Arif dikutip dari laman Kemenkop UKM, Minggu (28/4/2024).

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

"Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontra-produktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pema untuk mendukung UMKM," ucap Arif.

Arif juga membantah adanya

keberpihakan Kemenkop UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Ia menegaskan Kemenkop UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.

"Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021," kata Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, bahwa setiap Ke-menterian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum. "Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan," kata Arif.

Sebelumnya, Lurah Penatih I Wayan Murda meminta warung Madura tidak buka 24 jam. Dia mengatakan, pengelola warung sering berganti-ganti pegawai, sehingga terjadi pergantian administrasi penduduk tidak terdata.

Lalu, Kepala Satpol PP Klungkung Dewa Putu Suwarbawa menerima keluhan pengusaha minimarket soal warung madura yang beroperasi 24 jam. Sebab, tidak ada aturan soal jam operasional warung madura. Sedangkan aturan tersebut diterapkan ke minimarket. (wid,rls,ist/dya)

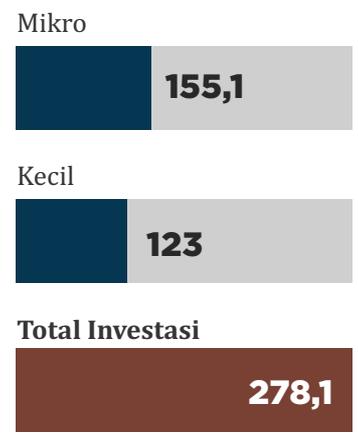


JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH/UMKM DI INDONESIA BERDASARKAN KELASNYA (2021)

Sumber : Databoks



REALISASI INVESTASI USAHA MIKRO KECIL/UMK BERDASARKAN JENISNYA (2023)



Sumber : Databoks

Alat Belajar SLB Tertahan Bea Cukai Sejak 2022, Sri Mulyani Turun Tangan

JAKARTA - Sorotan terhadap kebijakan Bea Cukai makin ramai usai viral cuitan guru SLB sial alat bantu belajar SLB ditagih ratusan juta. Barang pun ditahan sejak tahun 2022. Padahal itu merupakan sumbangan dari Korea Selatan.

"SLB saya juga mendapat bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Eh pas mau diambil di Bea Cukai Soetta suruh bayar ratusan juta. Mana denda gudang per hari. Dari tahun 2022 jadi nggak bisa keambil. Ngendep di sana buat apa nggak manfaat juga," curhat Rizal dengan akun @ijalzaid dalam platform X.

Cuitan ini pun viral dan ramai dibahas netizen. Akhirnya kasus ini langsung dijawab oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gatot S Wibowo.

"Saat ini sedang kami komunikasi-kami sangat baik dengan pihak Dinas Pendidikan DKI untuk memenuhi persyaratan mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak lainnya," kata Gatot, dikutip Minggu (28/4/2024).

Rizal tampak lega karena semakin ada titik terang untuk pihaknya mendapatkan bantuan berupa 20 pcs keyboard tersebut. Mulai Senin (29/4/2024), pihak sekolah akan bersurat ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk meminta dibuatkan surat permohonan bebas bea masuk dan pajaknya.

"Alhamdulillah sudah ada arahan untuk penyelesaian. InsyaAllah mulai hari Senin pihak sekolah bersurat berjenjang ke Dinas Pendidikan untuk meminta dibuatkan surat permohonan bebas bea. Terima kasih," cuitnya di X atau Twitter.

Barang untuk SLB ini dikirim dari OHFA Tech asal Korsel pada 16 Desember 2022 dengan nama penerima SLB-A Pembina Tingkat Nasional, Jakarta. Barang tersebut tiba di Indonesia tanggal 18 Desember 2022, namun tertahan di Bea Cukai.

Pihak sekolah mengatakan bahwa



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara mengenai kasus viral yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, salah satunya kasus peralatan sekolah milik SLB yang tertahan. (Foto: Instagram @smindrawati)

mereka mendapat email terkait penetapan nilai barang sebesar US\$ 22.846.52 (kurs Rp 15.688) Rp 361.039.239. Mereka juga diminta untuk mengirimkan kelengkapan dokumen.

Penjelasan Menteri Keuangan

Permasalahan ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan. Dia mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/4/2024) malam untuk menggelar rapat koordinasi.

Terkait itu, Sri Mulyani menyebut sebelumnya barang diberitahukan sebagai barang kiriman oleh perusahaan jasa titipan (PJT) pada 18 Desember 2022. Barang tersebut ditagih ratusan juta karena ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD). Baru belakangan diketahui ternyata itu merupakan barang hibah.

"Belakangan (di medsos

Twitter/X) baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah sehingga Bea Cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan perbaikan layanan di tengah maraknya kasus viral yang melibatkan instansi tersebut.

"Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator dan industrial assistance," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta Bea Cukai bekerja sama dengan para stakeholders terkait agar dalam

pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. (wid,ant,ist/dya)

KELUHAN WARGANET TERKAIT KEBIJAKAN BEA CUKAI ATAS IMPORTASI BARANG YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL SEPEKAN INI

1. BELI SEPATU BOLA RP 10 JUTA, KENA BEA MASUK RP 31 JUTA

● Mulanya, viral video yang diunggah akun TikTok @radhikaalthaf, Senin (22/4/2024), yang mengaku ditagih bea masuk oleh Direktorat Bea Cukai senilai Rp 31.810.343 atas pembelian sepatu seharga Rp 10.301.000.

● Menanggapi unggahan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu memberikan penjelasan besaran bea masuk Rp 31,81 juta ditetapkan dengan menghitung adanya denda administrasi atas pengiriman yang dilakukan importir atau jasa kiriman bersangkutan, yakni DHL. Denda administrasi diberikan karena adanya kesalahan penetapan nilai pabean atau CIF Semula, DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean atas barang yang dibeli oleh Radhika sebesar 35,37 dollar AS atau Rp 562.736. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah 553,61 dollar AS atau Rp 8,81 juta. "Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3," tulis DJBC.

2. HADIAH MAINAN MEGATRON MILIK INFLUENCER TERTAHAN DI BEA CUKAI

● Viral juga di media sosial mengenai seorang influencer, Medy Renaldy, yang mengeluhkan kiriman produk mainan dari luar negeri tertahan di Bea Cukai. Padahal mainan tersebut merupakan hadiah, bukan dibeli. Keluhan ini disampaikan Medy melalui akun X atau Twitter miliknya, @medyrenaldy pada Jumat (26/4/2024). Medy bilang, paket mainan yang dikirimkan perusahaan Robosen untuk dia review sudah dikirim sejak 15 April lalu. Seharusnya paket ini sampai pada 25 April sehingga dia bisa memberikan review mainan yang belum dirilis ini dan mengunggahnya ke media sosial. Namun, paket mainan kebijakan Bea Cukai atas importasi barang miliknya tertahan di Bea Cukai dengan keterangan "Permintaan Dokumen oleh Pejabat Bea Cukai: lampirkan bukti bayar dan invoice pembelian USD 1.699".

● Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing) "Oleh sebab itu, petugas BC mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya," jelas Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram resminya, @smindrawati, Sabtu (27/4/2024). Meski demikian, Sri Mulyani menyebut, saat ini laporan itu sudah selesai ditangani dan mainan yang sempat tertahan sudah diterima oleh influencer tersebut.



Dokter Pembuat Surat Sakit Gus Muhdlor Akui Keliru



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor lantik ulang 495 pejabat di Pendapa Delta Wibawa, Sabtu (27/4/2024). (Dok.ist)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat yang menerbitkan surat keterangan sakit Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Dokter pun disebut telah mengakui kekeliruan.

"Mengatakan memang dia (dokter) sendiri ada kekeliruan. Makanya kemudian kan diperbaiki, dilengkapi dengan data record-nya yang lengkap," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, dikutip Minggu (28/4/2024).

Ali mengatakan tak tertutup kemungkinan KPK memanggil dokter tersebut jika dianggap merintanginya penyidikan. Namun hal itu menunggu keputusan penyidik.

"Tapi sejauh ini kan kami belum melihat itu karena kami sudah melakukan komunikasi langsung dengan mereka di sana," sebutnya.

"Karena setelah kami mendapatkan surat yang kemarin kami sampaikan agak lain kan itu tim juga ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung," tambahnya.

Sebelumnya, sebuah surat sakit diterbitkan kala Gus Muhdlor absen dalam panggilan pertama KPK sebagai tersangka pada Jumat (19/4/2024). KPK menyebut surat sakit yang dikirimkan agak lain karena dicantumkan Gus Muhdlor dirawat dari 17 April 2024 sampai sembuh atau waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Bahwa yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir di gedung Merah Putih KPK dengan alasan sedang dirawat di rumah sakit, RSUD Sidoarjo Barat. Ada

surat keterangannya rawat inap yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa. Dirawat sejak 17 April 2024 sampai dengan sembuh," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).

"Ini agak lain suratnya. Kalau sembuhnya kapan, kan kita nggak tahu," tambahnya.

Bisa Dijemput Paksa

Kemudian, KPK memanggil ulang Gus Muhdlor pada Jumat (3/5/2024). KPK meminta Gus Muhdlor menghadiri pemeriksaan tersebut.

"Tim Penyidik telah menyiapkan penjadwalan pemanggilan ulang di hari Jumat (3/5/2025), bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di KPK, Jakarta Selatan, kepada wartawan Rabu (24/4/2025).

"Jemput paksa bisa dilakukan ketika tidak ada konfirmasi, dan kemudian ternyata mangkir. Mangkir itu tidak ada informasi yang disampaikan," lanjutnya.

Untuk itu, KPK berharap agar Gus Muhdlor kooperatif hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan.

"Kami tetap berharap bahwa yang bersangkutan kooperatif untuk hadir nanti di tanggal 3 hari Jumat, karena di situ lah dia kesempatan untuk bisa menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik," pungkas Ali.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo (Sekda) Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes menegaskan

bahwa meski menyandang status tersangka, Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P. atau akrab dipanggil Gus Muhdlor tetap dapat menjalankan tugas sebagai Bupati.

Salah satunya adalah melantik 495 Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tertutup di Pendopo Delta Wibawa, kemarin (Sabtu, 27/4/2024).

Soal pelantikan ulang ini, Fenny menyampaikan pihaknya telah berkonsultasi dengan pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. "Insya Allah kami sudah berkonsultasi dengan pakar hukum Unair Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. ucapnya Minggu (28/4/2024) saat dikonfirmasi

Fenny menyebutkan, bahwa sebagaimana dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Bupati Sidoarjo masih menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah karena tidak menyandang status terdakwa atau menjalani masa tahanan.

"Pasal 83 ayat 1, kepala daerah dan wakilnya bisa diberhentikan sementara, tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa atau menjalani masa tahanan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama yang ditetapkan tersangka dan ditahan adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1/2024).

Dari perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo. Ari telah ditahan KPK pada Jumat (23/2/2024).

Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Khusus pada 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar. (wid,ant,rls)

PERJALANAN KASUS GUS MUHDLOR

TERSANGKA

 1. Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka

 2. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor

DUGAAN KASUS

 Pungli dengan memotong dana insentif pajak ASN pada BPPD Sidoarjo. Nilai pungli untuk tahun 2023 mencapai Rp 2,7 miliar. Diduga, dari uang Rp 2,7 miliar itu, ada yang digunakan untuk kepentingan Muhdlor dan Kepala BPPD Sidoarjo.

JERATAN HUKUM

 Pasal 12 f dan atau 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

JEJAK KASUS

 **25 Januari 2024**

Gus Muhdlor sempat dicari Tim KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun tak berhasil ditemukan. Pada akhirnya Muhdlor tidak sempat diperiksa KPK.

 **1 Februari 2024**

Gus Muhdlor yang disokong PKB deklarasi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi itu digelar oleh pimpinan Ponpes Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali di Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat, Desa Lebo, Sidoarjo.

 **2 Februari 2024**

Gus Muhdlor dipanggil KPK untuk diperiksa. Tetapi dia tidak memenuhi panggilan tersebut.

 **8 Februari 2024**

Gus Muhdlor menyurati KPK dan meminta pemeriksaan dilakukan pada 16 Februari 2024.

 **16 Februari 2024**

Gus Muhdlor diperiksa KPK. Setelah pemeriksaan, dia membantah menerima aliran uang korupsi insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

 **16 April 2024**

KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.

Investor Hotel Lirik Taman Krida Budaya Jatim Pemkot Malang Siap Dampingi Proses Perizinan



Taman Krida Budaya Jatim (TKBJ) di Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Minggu (28/4/2024). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Perihal kabar investasi hotel bintang lima di area Taman Krida Budaya Jatim (TKBJ), Pemkot Malang menjamin siap mendukung proses perizinan agar berjalan cepat dan aman. Diketahui rencana itu saat ini masih dalam proses pertimbangan oleh pihak pemilik aset, yakni

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, Pemkot Malang siap

untuk memfasilitasi segala persyaratan perizinan sesuai aturan yang berlaku, apabila Pemprov menyetujui rencana penanaman modal di areatersebut.

"Saat ini pihak investor masih berproses di Pemprov, informasinya seperti itu. Entah itu terkait kerjasama pemanfaatan atau apa, itu masih negosiasi bersama pihak Pemprov," ujar Arif.

Arif menegaskan, jika investor telah ditentukan oleh Pemprov Jatim, Pemkot Malang akan segera membantu proses perizinan, yang di antaranya termasuk perizinan Online Single Submission (OSS), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Termasuk untuk analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan analisis dampak lingkungan (amdal) nya juga

kita akan melibatkan masyarakat. Sehingga apa yang jadi masukan warga, akan kita tuangkan di amdalnya nanti," tambah Arif.

Diketahui, hotel bintang lima yang akan dibangun di area seluas 2,7 hektare ini, ditaksir memiliki nilai investasi mencapai Rp 500 miliar. "Pemkot Malang ingin membuka investasi sebesar-besarnya, tapi ini kan aset milik Pemprov, jadi mereka yang menentukan investor mana yang terpilih," jelas Arif.

Lebih lanjut, jika proyek ini disetujui oleh pihak Pemprov Jatim, Arif menyebutkan, hal itu akan menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan Suhat yang sedang direncanakan untuk menjadi pusat wisata milenial.

Pasalnya, kawasan ini telah memiliki banyak kafe, wisata kuliner, dan fasilitas lainnya, tetapi belum memiliki hotel bintang lima. Selain itu, area yang juga dekat dengan banyak kampus, diharapkan investasi ini akan mendukung kebutuhan akomodasi di wilayah Suhat.

"Jadi kalau sesuai keinginannya Pak Pj Wali Kota, pinginnya kawasan Suhat ini dijadikan pusat wisata milenial. Kalau konsep kolonial kan sudah ada di Kayutangan Heritage," tukasnya. (Santi/Dya)

Triwulan Pertama 2024, Pendapatan Pajak Pemkab Malang Capai Rp 100 M

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sekitar Rp 100 miliar pada triwulan pertama 2024. Secara rinci, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendominasi.

"Kalau Sampai dengan saat ini, total itu (targetnya) sudah sekitar 20 persen, sekitar Rp 100 miliar penerimaan kita dari 10 sektor pajak," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (28/4/2024).

Made menambahkan, rata-rata realisasi pendapatan pajak per bulan mendekati 8 persen. Jika dijumlahkan selama tiga bulan pertama di 2024 ini, total capaian tersebut telah mendekati 24 persen dari target tahunan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD melalui sektor pajak berada di jalur yang tepat.

Dengan capaian tersebut, Made memperkirakan jika realisasi pajak daerah dalam sebulan mampu



Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara. (Dok. Instagram Bapenda Kab Malang)

mencapai kisaran 8,3 persen. Maka target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dapat tercapai hingga 100 persen.

"Masih sesuai prediksi bahwa setiap bulan penerimaan dari masing-masing sektor pajak sekitar 8 persen. Secara general, over all penerimaan

pajak masih bagus," tambahnya.

Diketahui, dari 10 sektor pajak yang dikelola Bapenda Kabupaten Malang, Made menyebut kontribusi terbesar berasal dari PBJT Tenaga Listrik dan BPHTB. Yang setidaknya telah memberikan kontribusi hampir mencapai Rp 40 miliar.

"Target pendapatan PBJT Tenaga Listrik pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 98,1 miliar, sedangkan BPHTB ditargetkan mencapai Rp 244,6 miliar," serunya.

Lebih lanjut, Mase menyebutkan, meski pendapatan pajak didominasi oleh BPHTB, namun rincian sebaran capaian pajak di Kabupaten Malang masih belum dapat dipastikan.

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para wajib pajak untuk merealisasikan kewajiban mereka menjelang akhir tahun. "Memang kadang-kadang transaksinya mendekati akhir tahun yang paling banyak. Mudah-mudahan target BPHTB yang sekitar Rp 240 miliar bisa kita capai," ujarnya.

Sebagai informasi, 10 sektor pajak yang dikelola Bapenda Kabupaten Malang meliputi PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Makanan/Minuman, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT Tenaga Listrik, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PBJT Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan BPHTB. (Santi/Dya)

PESAN

DAFFA WARDHANA

Lewat Film 'Menjelang Ajal'

AKTOR Daffa Wardhana menyebut dalam film terbarunya "Menjelang Ajal" bukan hanya sekadar menampilkan adegan horor yang mengagetkan namun juga terselip pesan menyentuh tentang perjuangan seorang ibu untuk menghidupi ketiga anaknya sendirian.

"Orang tua pasti ada caranya masing-masing untuk memperjuangkan anaknya sendiri, pasti adegan emosionalnya juga bikin buat diri aku sendiri berterima kasih buat ibu aku," kata Daffa dalam acara pemutaran film "Menjelang Ajal" di Jakarta, Jumat (26/4).

Daffa mengatakan dalam film ini menceritakan drama perjuangan seorang ibu tunggal bernama Sekar yang harus menghidupi ketiga anaknya dengan berjualan makanan di warung.

Namun cara yang ditempuh Sekar untuk melariskan dagangannya memakai medium yang salah yang akhirnya berdampak buruk pada ia dan anak-anaknya hingga mengancam nyawa.

Ia juga beruntung bisa ikut bermain di film ini dan pertama kalinya beradu akting dengan Shareefa Danish yang berperan sebagai Sekar, ibu dari Dani yang diperankan oleh Daffa.

"Ini pertama kali main sama Danish, Kak Danish juga sangat membantu tapi nggak bohong memang setelah syuting atau lagi nunggu take suka nanya-nanya ke Kak Dani dan dibawa scenenya, ini bagian dari perjalanan karir aku," katanya.

Dalam satu adegan, Daffa juga dituntut untuk berdialog dengan penuh emosional bersama Danish dalam satu frame, itu membuatnya menjadi tantangan tersendiri karena adegan tersebut merupakan 10 menit pertama yang menentukan penonton akan bertahan di film tersebut atau tidak.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Daffa dalam film ini adalah saat ia harus berperan sebagai kakak yang tangguh tapi juga di satu sisi rapuh dan bertahan demi adik-adiknya.

Ia juga harus berakting melawan roh jahat yang merasuki ibunya karena perjanjian pesugihan dengan jin.

"Aku sendiri nggak punya kakak atau adik, anak tunggal, jadi itu kesulitan. Aku sendiri nggak relate punya adik atau kakak, cuma di sini dibantu teman-teman dan director hebat," ucap Daffa.

Profil

Lahir pada tanggal 28 November 1998, Daffa telah mencuri perhatian penonton dengan penampilannya yang memukau di dunia hiburan tanah air.

Daffa tidak hanya dikenal sebagai seorang aktor, tetapi juga seorang mahasiswa yang berprestasi.

Ia menyelesaikan pendidikannya di University of Melbourne dengan gelar Bachelor of Commerce dengan spesialisasi dalam Finance and Accounting.

Kombinasi antara pendidikan yang solid dan bakatnya dalam dunia seni peran membuatnya menjadi sosok yang berbeda di industri hiburan.

Pintu menuju industri hiburan terbuka bagi Daffa Wardhana ketika ia membintangi serial web berjudul "Married With Senior" pada tahun 2022.

Perannya dalam serial tersebut mendapat pujian dari penonton dan kritikus, membuktikan bahwa Daffa adalah aktor yang patut diperhitungkan.

Selain itu, Daffa juga telah membintangi sejumlah film dan serial yang sukses, seperti "Panduan Mempersiapkan Perpisahan" (2023), "YOLO!" (2023), dan "Can You Hear Me?" (2022).

Kehadirannya dalam berbagai proyek hiburan telah membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh publik.

Daffa Wardhana adalah contoh nyata dari seorang individu yang menggabungkan pendidikan yang kuat dengan bakat alami dalam seni peran.

Dengan prestasinya yang terus berkembang di dunia hiburan Indonesia, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa masa depan cerah sedang menantinya (Antara)



DOKTER ANJURKAN ANAK PAKAI MASKER CEGAH PENYAKIT PANCARоба



DIREKTUR Penunjang Medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang, dr Natalia Kurniadi, menganjurkan anak-anak untuk tetap memakai masker di tempat keramaian untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin muncul di masa peralihan dari musim hujan ke kemarau ini.

"Selalu memakai masker di keramaian karena penyebaran virus penyakit di masa pancaroba ini melalui udara," kata Natalia saat peresmian Klinik Pediatrik RS Telogorejo Semarang, Sabtu.

Menurut dia, penyakit yang menyerang anak di masa peralihan ini berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), seperti bronkitis serta pneumonia.

Oleh karena itu, ia mengimbau orang tua selalu memerhatikan asupan gizi berimbang untuk anak-

anaknya.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada orang tua untuk membiasakan anak-anaknya untuk mencuci tangan.

Adapun Klinik Pediatrik RS Telogorejo Semarang, kata dia, merupakan klinik anak yang terintegrasi yang menyediakan layanan dalam satu tempat.

Pada klinik pediatrik ini, kata dia, tersedia layanan untuk gangguan ginjal, syaraf, konsultasi tumbuh kembang anak, klinik mata dan gigi, hingga fisioterapi anak.

"Disediakan layanan fisioterapi anak, sehingga tidak perlu harus berpindah bagian," katanya.

Bahkan, menurut dia, rumah sakit ini juga menyediakan layanan untuk membantu anak penderita stunting.

"Kami sudah menyiapkan tim khusus untuk penanganan

stunting yang antara lain terdiri dari dokter spesialis anak dan dokter gizi," katanya.

Ia menambahkan kerja sama juga dilakukan rumah sakit dengan puskesmas di sekitar institusi layanan kesehatan ini dalam upaya membantu penanganan stunting.

Mengutip halodoc, musim pancaroba adalah periode peralihan antara dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Transisi ini terjadi dua kali setahun, tepatnya ketika matahari melintasi garis khatulistiwa.

Di wilayah tropis, seperti Indonesia, musim pancaroba umumnya terjadi pada bulan Maret hingga Mei, yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, dan September hingga November yakni transisi dari musim kemarau ke musim

hujan.

Musim pancaroba ditandai oleh cuaca yang tidak menentu, termasuk hujan yang tak terduga, suhu udara yang bervariasi, dan perubahan pola angin.

Fenomena ini dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari pertanian hingga kesehatan.

Musim pancaroba sering dianggap sebagai musim penyebar penyakit. Pasalnya, transisi antara musim hujan dan musim kemarau dalam musim pancaroba sering disertai dengan fluktuasi suhu dan kelembaban udara.

Kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur untuk berkembang biak dengan cepat (Antara)



"Selalu memakai masker di keramaian karena penyebaran virus penyakit di masa pancaroba ini melalui udara,"

dr Natalia Kurniadi,

GOOGLE UJI FITUR LATIHAN BICARA

GOOGLE sedang menguji fitur latihan bicara baru pada Penelusuran untuk membantu pengguna meningkatkan keterampilan bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris menurut siaran TechCrunch pada Jumat (26/4).

Perusahaan menyampaikan kepada TechCrunch bahwa fitur tersebut tersedia bagi pelajar bahasa Inggris di Argentina, Kolombia, India, Indonesia, Meksiko, dan Venezuela yang telah bergabung dengan Search Labs, program bagi pengguna untuk bereksperimen dengan pengalaman Google Penelusuran tahap awal.

Perusahaan menyatakan bahwa eksperimen itu ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pengguna.

Google mengajak untuk ambil bagian dalam latihan pembelajaran bahasa interaktif yang didukung oleh kecerdasan artifisial sehingga membantu mereka menggunakan kata-kata baru dalam skenario sehari-hari.

Fitur latihan bicara dibangun berdasarkan fitur yang diluncurkan Google pada Oktober 2023, yang dirancang untuk membantu pelajar bahasa Inggris meningkatkan keterampilan mereka.

Fitur yang diluncurkan tahun lalu memungkinkan pelajar bahasa Inggris untuk berlatih mengucapkan kalimat sesuai konteks dan menerima umpan balik mengenai tata bahasa dan kejelasannya.

Fitur latihan bicara yang baru menambahkan dimensi latihan percakapan bolak-balik.

Pengguna X yang pertama mendapati fitur latihan bicara pada Google Penelusuran membagikan tangkapan layar dari fungsi tersebut.



Fitur latihan bicara bekerja dengan mengajukan pertanyaan percakapan kepada pengguna, yang perlu merekaanggapi menggunakan kata-kata tertentu.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan pengguna X, salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah kecerdasan artifisial memberi tahu pengguna bahwa mereka ingin tubuhnya bugar dan mengajukan pertanyaan, "Apa yang harus saya lakukan?"

Pengguna kemudian perlu mengucapkan respons dengan menyertakan kata exercise (olahraga), heart (jantung), dan tired (lelah).

Ide di balik fitur itu adalah membantu orang yang sedang belajar untuk melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris sekaligus memahami cara menggunakan kata-kata secara benar.

Peluncuran fitur baru itu mengindikasikan kemungkinan Google sedang meletakkan dasar bagi pesaing aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo dan Babbel.

Ini bukan pertama kalinya Google mencoba alat pembelajaran dan pendidikan bahasa.

Pada 2019, Google meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna Penelusuran mempraktikkan cara mengucapkan kata dengan benar.

"Google Search sudah menjadi alat yang berharga bagi mempelajari bahasa, menyediakan terjemahan, definisi, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kosa kata," kata Direktur Riset Google Christian Plagemann.

"Sekarang, pelajar yang menerjemahkan ke atau dari bahasa Inggris di ponsel Android mereka akan menemukan pengalaman latihan

berbicara bahasa Inggris baru dengan masukan yang dipersonalisasi," imbuhnya.

Pengalaman baru ini memberikan petunjuk kepada pengguna Google Search dan meminta agar mereka mengucapkan jawabannya menggunakan kosakata yang disediakan.

Google bermitra dengan ahli bahasa, guru, dan pakar pedagogi ESL/EFL untuk menciptakan pengalaman latihan berbicara yang efektif dan memotivasi.

Fitur masukan yang dipersonalisasi memberi pengguna tanggapan semantik mengenai keterampilan berbicara penggunanya, memberi mereka gambaran apakah jawaban yang digunakan terhadap sebuah pertanyaan kemungkinan besar akan dipahami oleh lawan bicara atau tidak (Antara/CNBC)



BAHAYA BAHAN KIMIA DI MAKANAN LAUT

SEBUAH studi baru menunjukkan bahwa mengonsumsi spesies laut tertentu secara teratur dapat meningkatkan risiko paparan zat perfluoroalkyl dan polyfluoroalkyl (PFAS), yang biasa disebut sebagai "bahan kimia selamanya".

Ditulis laman Health, Jumat, penelitian yang dilakukan pada penduduk Portsmouth, New Hampshire menemukan keberadaan PFAS dalam berbagai produk, dengan konsentrasi tertinggi pada udang dan lobster.

PFAS adalah bahan kimia produksi yang digunakan dalam segala hal mulai dari pakaian hingga insulasi kabel listrik.

Bahan-bahan tersebut tidak terurai sepenuhnya sehingga berakhir di udara dan perairan, mencemari makanan dan minuman kita.

Para ilmuwan telah mengaitkan bahan kimia tersebut dengan beberapa dampak kesehatan manusia, termasuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan hati, dan peningkatan risiko kanker tertentu.

"Kami berharap hal ini dapat menarik perhatian pada fakta bahwa konsumsi makanan laut dapat menjadi jalur penting paparan PFAS bagi konsumen makanan laut yang tinggi," ucap rekan penulis studi dan profesor riset di Departemen Ilmu Biologi di Dartmouth College, Celia Y. Chen, PhD.

Namun penulis penelitian Megan Romano, PhD, mencatat bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang hubungan antara PFAS dan makanan laut, termasuk interaksi faktor-faktor yang menyebabkan akumulasi PFAS dalam jaringan hewan air.

Para ahli menekankan bahwa Anda

tidak perlu menghilangkan makanan laut sama sekali untuk menghindari paparan PFAS yang tidak aman. Sebaliknya, berhati-hatilah saat memilih mana yang akan dimakan.

"Makanan laut merupakan sumber protein tanpa lemak dan asam lemak omega yang sangat baik, namun mungkin juga mengandung PFAS atau merkuri, jadi penting bagi kita untuk menjadi konsumen yang berhati-hati. Hal ini sangat penting bagi kelompok rentan, seperti orang hamil dan anak kecil," kata Romano.

Pilihlah spesies yang menurut peneliti mengandung PFAS dalam jumlah lebih rendah, seperti nila.

Ikan yang lebih kecil seperti nila atau sarden umumnya cenderung lebih rendah kontaminannya.

"Kuncinya adalah mengonsumsi makanan seimbang yang mencakup beragam makanan sehat dan sumber protein," kata Romano. Meski di satu sisi mengonsumsi lobster, udang, tuna dan makanan laut lainnya dapat membantu meningkatkan kadar Omega-3.

Para ahli dari Dartmouth College di Inggris mencatat bahwa ada pedoman konsumsi makanan laut yang aman untuk merkuri dan kontaminan lainnya, tetapi tidak untuk PFAS.

Studi ini menekankan perlunya pedoman kesehatan masyarakat yang lebih ketat yang menetapkan jumlah makanan laut yang aman dikonsumsi.

"Rekomendasi kami bukan untuk melarang mengonsumsi makanan laut. Makanan laut adalah sumber protein tanpa lemak dan asam lemak omega yang baik. Namun, makanan laut juga merupakan sumber paparan PFAS," kata Megan Romano.

"Memahami manfaat sekaligus risiko dari konsumsi makanan laut ini penting bagi masyarakat yang mengambil keputusan mengenai pola makan, terutama bagi populasi rentan. Seperti wanita hamil dan anak-anak," kata Romano.

Dalam studi tersebut, tim mengukur kadar 26 varietas PFAS dalam sampel spesies laut yang paling banyak dikonsumsi: ikan kod, ikan haddock, lobster, salmon, scallop, udang, dan tuna (Antara)

Ditulis laman Health, Jumat, penelitian yang dilakukan pada penduduk Portsmouth, New Hampshire menemukan keberadaan PFAS dalam berbagai produk, dengan konsentrasi tertinggi pada udang dan lobster.

PFAS adalah bahan kimia produksi yang digunakan dalam segala hal mulai dari pakaian hingga insulasi kabel listrik. Bahan-bahan tersebut tidak terurai sepenuhnya sehingga berakhir di udara dan perairan, mencemari makanan dan minuman kita.

Para ilmuwan telah mengaitkan bahan kimia tersebut dengan beberapa dampak kesehatan manusia, termasuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan hati, dan peningkatan risiko kanker tertentu.

"Kami berharap hal ini dapat menarik perhatian pada fakta bahwa konsumsi makanan laut dapat menjadi jalur penting paparan PFAS bagi konsumen makanan laut yang tinggi," ucap rekan penulis studi dan profesor riset di Departemen Ilmu Biologi di Dartmouth College, Celia Y. Chen, PhD.

Namun penulis penelitian Megan Romano, PhD, mencatat bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang

hubungan antara PFAS dan makanan laut, termasuk interaksi faktor-faktor yang menyebabkan akumulasi PFAS dalam jaringan hewan air.

Para ahli menekankan bahwa Anda tidak perlu menghilangkan makanan laut sama sekali untuk menghindari paparan PFAS yang tidak aman. Sebaliknya, berhati-hatilah saat memilih mana yang akan dimakan.

"Makanan laut merupakan sumber protein tanpa lemak dan asam lemak omega yang sangat baik, namun mungkin juga mengandung PFAS atau merkuri, jadi penting bagi kita untuk menjadi konsumen yang berhati-hati. Hal ini sangat penting bagi kelompok rentan, seperti orang hamil dan anak kecil," kata Romano.

Pilihlah spesies yang menurut peneliti mengandung PFAS dalam jumlah lebih rendah, seperti nila.

Ikan yang lebih kecil seperti nila atau sarden umumnya cenderung lebih rendah kontaminannya.

"Kuncinya adalah mengonsumsi makanan seimbang yang mencakup beragam makanan sehat dan sumber protein," kata Romano.

Meski di satu sisi mengonsumsi lobster, udang, tuna dan makanan laut lainnya dapat membantu meningkatkan kadar Omega-3.

Para ahli dari Dartmouth College di Inggris mencatat bahwa ada pedoman konsumsi makanan laut yang aman untuk merkuri dan kontaminan lainnya, tetapi tidak untuk PFAS.

Studi ini menekankan perlunya pedoman kesehatan masyarakat yang lebih ketat yang menetapkan jumlah makanan laut yang aman dikonsumsi. (Antara)



Hiruk Pikuk Koalisi ... (dari Hal 1)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyalakan dokter bagi hakim konstitusi selama menjalani tahapan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Selain dokter, vitamin pun disiapkan untuk para hakim konstitusi.

"Pertama, dokter poliklinik kita siapkan selama masa PHPU. Kita juga siapkan vitamin," kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, Minggu (28/4/2024).

Tidak hanya dokter dan vitamin, Fajar mengungkapkan, pihaknya menyiapkan pula tukang pijat bagi hakim dan pegawai yang bertugas untuk melepas lelah. Ia menambahkan, pihaknya juga memperhatikan kandungan gizi dalam asupan makanan para hakim.

Persiapan ini telah menjadi tradisi yang dilakukan dalam masa penanganan perkara PHPU Pileg dari tahun ke tahun.

"Untuk asupan makanan, kita kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka menakar gizi, kalori, maupun karbohidrat agar tidak berlebihan. Selain itu, agar tidak ada zat-zat yang berpotensi mengganggu, seperti formalin," ujarnya.

Persiapan itu dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan para hakim yang akan menyidangkan ratusan perkara selama masa tahapan penanganan sengketa Pileg.

"Penanganan PHPU Pileg itu butuh energi yang luar biasa. Persidangan belum tentu selesai sore hari, bisa lanjut sampai malam. Setelah selesai, tidak bisa langsung pulang. Perlu persiapan untuk persidangan esok harinya," tutur dia.

Ia menyebut, pada penanganan PHPU Pileg 2019, sidang bisa berjalan dari pukul 08.00 pagi hingga dini hari keesokan harinya. Istirahat yang diberikan hanya untuk beribadah dan makan. Oleh karena itu, persiapan dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan hakim agar selalu fit dan sehat.

Diketahui, MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pileg 2024 mulai Senin (29/4/2024) dengan menyidangkan 79 perkara yang terbagi dalam tiga panel persidangan. Panel pertama untuk 25 perkara, panel dua untuk 28 perkara, dan panel tiga untuk 26 perkara.

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan adalah tahapan pemeriksaan kelengkapan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti pemohon.

Untuk lokasi, persidangan akan digelar di dua ruang sidang di Gedung 1 MK dan satu ruang sidang Gedung 2 MK.

Arsul Sani Ikut Bersidang

Di sisi lain MK mengatakan Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 dengan pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP). MK menyebut tak ada larangan bagi Arsul ikut menyidangkan perkara, sekalipun ia merupakan eks kader PPP.

"Boleh (ikut menyidangkan). Meskipun dulu dia kader PPP, sekarang dia sudah jadi hakim dan sudah disumpah, jadi tidak apa-apa," kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Minggu (28/4/2024).

Meskipun Arsul Sani sempat menyatakan tidak ingin memproses dan mengadili perkara PHPU Pileg yang berkaitan dengan PPP, Fajar mengatakan MK tetap melibatkan Arsul dalam persidangan.

"Karena kalau seperti itu, nanti mempersulit atau setidak-tidaknya jalannya persidangan jadi tidak lancar," kata dia.

Hal tersebut berbeda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak boleh ikut menyidangkan perkara PHPU di mana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pihak yang terlibat. Fajar mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Berbeda dengan Pak Anwar yang sudah ada putusan MKMK. Pak Arsul, kan, tidak ada putusan yang melarang, jadi tidak apa-apa," kata dia.

Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi partai terbanyak yang mengajukan gugatan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Data jadwal gugatan dari situs mkri.id, Jumat (26/4/2024), PPP melayangkan sengketa sebanyak 24 permohonan. Kemudian, disusul Partai Nasdem dengan 20 gugatan, Partai Amanat Nasional (PAN) 19 gugatan, serta Partai Gerindra dan Demokrat masing-masing 17 gugatan.

Ada juga Partai Golkar dengan 14 gugatan, PDI-P 13 gugatan, Partao

Kebangkitan Bangsa (PKB) 12 gugatan, dan Partai Bulan Bintang (PBB) delapan gugatan.

Selanjutnya, Perindo enam gugatan, Hanura empat gugatan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gelora masing-masing tiga gugatan, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Garuda masing-masing dua gugatan.

KPU- Bawaslu Siap

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi gugatan Pileg tersebut. Mereka telah menyediakan jawab untuk para pemohon.

"Dalam menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2024 yang akan dimulai besok pada 29 April 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, KPU RI telah siap untuk menghadapi 285 permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan e-BRPK yang diterima KPU dari MK pada tanggal 23 April 2024 lalu," kata Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/4/2024).

Afifuddin menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU di tingkat daerah. Ini untuk mempersiapkan jawaban para pemohon.

"Prinsipnya KPU telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran KPU, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan kepada MK mulai dari tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan MK untuk menghadapi persidangan pemeriksaan yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024," ucap Afifuddin.

KPU juga telah memberikan kuasa kepada 8 kantor hukum untuk membantu KPU membantah dalil-dalil permohonan.

"Dalam menghadapi PHPU Pileg 2024 ini juga, KPU telah memberikan kuasa kepada 8 Kantor Hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan, untuk dapat mengoptimalkan KPU dalam membantah dalil-dalil permohonan pemohon," pungkasnya.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tak me-

iliki persiapan khusus menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak ada persiapan yang bersifat khusus," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Media Indonesia, Minggu, 28 April 2024.

Puadi menyampaikan pihaknya hanya menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan. Laporan disebut sudah dipersiapkan.

"Jajaran pengawas hanya menyiapkan laporan terkait hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pengawas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan calon anggota legislatif pada Pemilu 2024," ungkap dia.

Puadi menyebut posisi Bawaslu dalam perkara PHPU Pileg 2024 adalah sebagai pemberi keterangan. Hal itu sesuai dengan hukum acara PHPU Presiden maupun Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi.

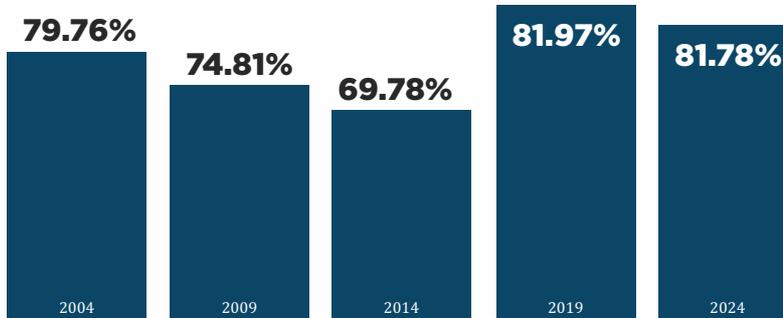
Keterangan yang diberikan Bawaslu merujuk pada hasil pengawasan. Seperti aspek pencegahan hingga penindakan.

"(Penindakan) yang bersumber dari laporan masyarakat atau hasil temuan jajaran Bawaslu di lapangan," sebut dia.

Selain itu, Puadi menyampaikan pihaknya memberikan penguatan dan pendampingan kepada Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota dalam penyusunan keterangan tersebut. Sehingga, laporan yang disampaikan dapat menggambarkan kinerja Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Menjelaskan kepada sidang Mahkamah terkait apa hasil pengawasan Bawaslu terkait masalah yang didalilkan oleh Pemohon dalam sengketa PHPU," ujar dia. (wid,ant,ls,ist/dya)

JUMLAH PEMILIH YANG BERPARTISIPASI DALAM PILPRES (2004-2024)



5 PROVINSI DENGAN PERKARA SENGKETA PEMILU DPR/ DPRD TERBANYAK (2024)*



Sumber : Databoks

Korupsi 'Berjamaah' Timah Total 21 Tersangka, Terbaru Bos Sriwijaya Air

JAKARTA- Kasus tindak pidana korupsi terjadi dalam tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah merilis total 21 nama tersangka beserta nama perusahaannya yang tercatat aktif melakukan produksi timah di Tanah Air. Terbaru, pemilik PT Sriwijaya Air, Hendry Lie, ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya Hendry Lie, sang adik Fandy Lingga juga ditetapkan sebagai tersangka.

Tercatat Hendry Lie merupakan Beneficiary Owner PT TIN dan Fandy Lingga selaku marketing PT TIN. Keduanya disebut membentuk dua perusahaan boneka berkedok penyewaan alat peleburan timah untuk menutupi kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi.

"Di mana keduanya membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya," ungkap Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi dikutip Minggu (28/4/2024).

Berdasarkan laman resmi Sriwijaya Air, Hendry Lie tercatat sebagai komisaris perusahaan bersama sang kakak, Chandra Lie. Keduanya merupakan pendiri Sriwijaya Air di 2002.

Perjalanan bisnis penerbangan ini terbilang moncer. Saat mengudara pertama kali pada 10 November 2003 ini cuma punya satu armada jenis Boeing 737-200. Lama kelamaan, pesawat yang dimiliki pun bertambah jadi 15 dengan masih tipe Boeing.

Baru 4 tahun mengudara, maskapai diganjar penghargaan keselamatan penerbangan dari Boeing tahun 2007, yaitu Boeing International Award for Safety and Maintenance of Aircraft.

Kondisi tersebut dilengkapi pada tahun 2013 dengan mendirikan maskapai pempunyan yang diberi nama NAM Air. Sederet lainnya perusahaan yang juga tercatat sebagai anak usaha perseroan, sekolah penerbangan di Pangkal Pinang, National Aviation Management serta sekolah awak kabin bernama National Aircrew Management.

Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena masalah keuangan datang karena harus menanggung utang yang besar. Apalagi keadaan diperparah usai Sriwijaya Air 'bercerai' dengan Garuda Indonesia pada 2019.

Sebelum Sriwijaya Air dibelit masalah keuangan dan menjalin kerja sama dengan Garuda Indonesia, Hendry pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris Sriwijaya Air.

Sebelumnya Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis juga diduga terlibat. Harvey dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang



(ilustrasi). Total pihak yang ditetapkan tersangka dalam rasuah ini mencapai 21 orang.dok

(TPPU) dalam kasus korupsi Timah ini.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan korupsi timah harus menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah untuk lebih mendorong digitalisasi dalam semua sistem investasi, termasuk di sektor pertambangan.

Kerugian mencapai Rp271 triliun

Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun, dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kendati demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

Kendaraan mewah Harvey disita

Kejaksaan Agung turut menyita mobil milik tersangka Harvey Moeis dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah ini. Mobil yang disita adalah dua unit Ferrari dan satu Mercedes Benz, Lexus dan Toyota Vellfire.

Kemudian penyidik turut menyita dua mobil mewah jenis Rolls-Royce dan Mini Cooper S Countryman F60.

Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti elektronik, sekumpulan dokumen, hingga barang mewah berupa jam yang masih harus diverifikasi keasliannya.

"Barang mewah (jam) belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Selanjutnya, penyidik akan terus menggali fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang tindak pidana," kata Kepala Pusat Penerangan

Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Smelter Juga Disita

Kejagung telah menyita smelter pada empat perusahaan di Bangka Belitung, mulai dari CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Internusa (TI) dan PT Sariwiguna Bina Sentosa.

Total luas smelter yang disita mencapai 238.848 meter persegi.

Selain itu, Kejagung juga menyita alat berat dan alat pemurnian bijih timah milik PT Refined Bangka Tin (RBT) dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada Senin (22/4).

Selain menyita empat smelter di Bangka Belitung, Kejagung juga mengamankan 51 unit excavator dan 3 bulldozer.

Jerat pendiri Sriwijaya Air sebagai tersangka

Selain 16 tersangka yang sudah diumumkan, baru-baru ini Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan kelima tersangka masing-masing adalah pendiri Sriwijaya Air sekaligus beneficial owner PT TIN HL atau Hendrie Lie dan FR selaku marketing PT TIN.

Kemudian SW, Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung periode Maret 2015 sampai 2019; BN selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2019 dan AS selaku Plt Kepala Dinas ESDM yang selanjutnya ditetapkan sebagai kepala dinas.

"Selanjutnya setelah dilanjutkan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka," kata Kuntadi dalam konferensi pers, Jumat (26/4/2024) lalu.

Tiga tersangka yakni FR, AS dan SW ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara tersangka BN tidak ditahan karena alasan kesehatan.

"Sedangkan terhadap tersangka HL yang pada hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka," katanya.

Pada kasus ini, Kejagung menyebut Hendry Lie terlibat dalam pembentukan CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk kegiatan ilegal. (wid,rlsist/dya)

5 TERSANGKA BARU YANG DITETAPKAN KEJAGUNG

- Pemilik PT Sriwijaya Air; Hendry Lie,
- Fandy Lingga, adek Hendry Lie (PT Timah Tbk/TINS)
- SW, selaku Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-Maret 2019
- BN, selaku Plt Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2019
- AS, selaku Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung.

TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI TIMAH

1. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021
5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018
6. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP
7. RI selaku Direktur Utama PT SBS
8. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN
9. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP
10. TT, Tersangka kasus perintangan penyidikan perkara
11. RL, General Manager PT TIN
12. SP selaku Direktur Utama PT RBT
13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk.
15. Helena Lim selaku manager PT QSE
16. Harvey Moeis Perpanjangan tangan PT RBT